



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102/DJU/SK.TI1.1/I/2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI  
PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) TINGKAT PUSAT DAN  
PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM  
TAHUN 2024**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa di seluruh 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja Lingkungan Peradilan Umum sudah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelaksanaan administrasi perkara;
  - b. bahwa seiring adanya perpindahan tugas anggota Satgas SIPP Tahun 2023 dan pembaruan yang terus dilakukan untuk penyempurnaan SIPP, disamping adanya permasalahan teknis maupun non teknis dalam penerapan SIPP pada satuan kerja maka dibutuhkan suatu Satuan Tugas untuk menghimpun masukan dan permasalahan di satuan kerja, serta mengkoordinasikan penyelesaian dan informasi antara tim pengembang di pusat dengan pengelola di satuan kerja;
  - c. bahwa memperhatikan butir a dan b tersebut maka dipandang perlu untuk memperbaharui Satuan Tugas SIPP Tingkat Pusat dan Satuan Tugas SIPP Tingkat Banding sesuai usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing;
  - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota satgas SIPP;

**Mengingat...**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Perkara Pidana;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 102/DJU/SK.TI1.1/I/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) TINGKAT PUSAT DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat dan Tingkat Banding pada Pengadilan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA...**

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pusat mempunyai tugas :

1. Kesekretariatan :

- a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
- b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
- c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
- e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

2. Divisi Kajian :

- a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

**3. Divisi Teknis...**

3. Divisi Teknis Aplikasi :

- a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Tingkat Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
- f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

**KETIGA** : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding mempunyai tugas:

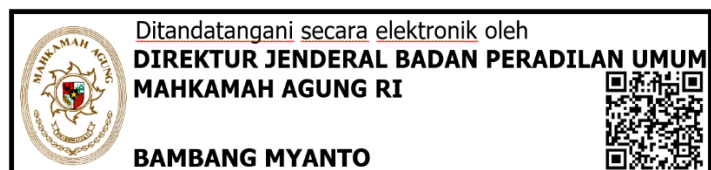
1. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) baik di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya;

**4.Melakukan...**

4. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tingkat Banding dengan Satgas SIPP seluruh Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya minimal 1 kali dalam setahun;
6. Membuat laporan implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum;
8. Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan register elektronik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

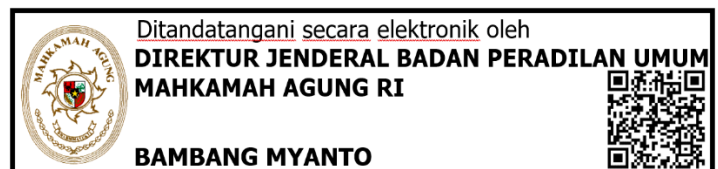
1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

**DAFTAR NAMA**  
**SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA**  
**(SATGAS SIPP)**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>POSISI DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	H. Bambang Myanto, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembina
2.	Zahlisa Vitalita, S.H., M.H	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Ketua Satgas
3.	Budi Setioko, S.H., M.H.	Kasubdit Statistik dan Dokumentasi	Sekretaris Satgas
<b>KESEKRETARIATAN</b>			
4.	Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom, S.H	Kepala Seksi Statistik	Koordinator
5.	Misra Dewita, S.H., M.H	Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum	Anggota
6.	Leni Cahyani, S.H., M.H.	Kepala Seksi Sarana Pengadilan	Anggota
7.	Rosalia Puspa K, S.E., M.H.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	Anggota
8.	Reni Kartini, S.H	Kepala Seksi Tata Persidangan	Anggota
9.	Marthinalova Noll, S.Kom	Staf Seksi Statistik	Anggota
10.	Safitri, A.Md.	Staf Seksi Sarana Kerja Pengadilan	Anggota
<b>DIVISI KAJIAN</b>			
11.	Muhammad Damis, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Koordinator
12.	Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Anggota
13.	Achmad Yusak, S.H., M.H	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Anggota
14.	Tony Pribadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta	Anggota

15.	Sudarwin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung	Anggota
17.	Achmad Guntur, S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	Anggota
18.	Mustamin, SH., MH.	Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Anggota
19.	Rizkiansyah, S.H., LL.M	Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
20.	Zulfahmi Anwar, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Anggota
21.	Lies Khadijah, S.H., M.H.	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Anggota
22.	Candra S.H.	Kasubdit Tata Kelola	Anggota
23.	Achmad Basyari, S.E.	Kepala Seksi Pelayanan Peradilan	Anggota
<b>DIVISI TEKNIS APLIKASI</b>			
24.	Jhon Hendriansyah, SH.	Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Jambi	Koordinator
25.	Roby Hidayat, S.T	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tinggi Riau	Anggota
26.	Fransisco Palang Ama, ST.	Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang	Anggota
27.	Aris Susilo, ST.	Sekretaris Pengadilan Negeri Madiun	Anggota
28.	Dona Panambayan, SH., MH.	Panitera Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota
29.	Marisa Eka Putra, ST., M.Eng	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang	Anggota
30.	Oktein Josepus Susak, SH., MH.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi	Anggota
31.	Yenny Viky Effendy, ST., M.Eng	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta	Anggota
32.	Fadli, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Makassar	Anggota
33.	Imam Maxudi, S.Kom	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	Anggota

34.	Ita Masyita, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Anggota
35.	Adityo Nugroho, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
36.	Aditya Widyartadi, S.Kom	Kepala Seksi Bimbingan I	Anggota
37.	Zeno Dani Kuncoro, ST.	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Anggota
38.	Oktaviandi Wahyu Nugroho, ST.	Staf Seksi Tata Persidangan	Anggota
39.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
40.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Badilum	Anggota
41.	Didik Irfan Setiawan, Amd.Kom.	Penyusun laporan Keuangan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Negeri Mojokerto	Anggota
42.	Puji Wiyono, S.Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Klaten	Anggota
43.	Raja Muda Arief, S. Kom	Pegawai Tidak Tetap pada Pengadilan Negeri Stabat	Anggota





**DAFTAR NAMA**  
**SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA**  
**PENGADILAN TINGGI**  
**(SATGAS SIPP PT)**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Makaroda Hafat, SH., M.Hum.	196305301988031003	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2.	Irwan Efendi, S.H., M.Hum.	196505041992121001	
3.	Rasyed Hakimsyah Ginting, S.Kom.	199205192015031001	
4.	Sigit Pramono Ginting, A.Md.T.	199812282020121003	
5.	Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H.	196109121988031003	Pengadilan Tinggi Medan
6.	Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.	196812251992121001	
7.	Roy Samuel Fernandus, S.T.	199106072015031001	
8.	Candra Arris Saputra, S.Kom	199103242015031003	
9.	Inrawaldi, S.H., M.H.	196210211988031001	Pengadilan Tinggi Padang
10.	Masrizal, S.H., M.H.	196111111988031004	
11.	Reflison Augusto, S.Kom	198808262015031002	
12.	Nabilah Jasmine, S.Kom.	199602042020122007	
13.	Jon Effreddi, S.H., M.H.	196404021985031005	Pengadilan Tinggi Riau
14.	Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H	196208221992121001	
15.	Fadhliamin, S.Si	199102062015031003	
16.	Melgisaputra Dwi Nanda, S.Kom., M.Kom	199303102020121005	

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	F. X. Supriyadi, S.H., M.H.um	195910241988031002	Pengadilan Tinggi Jambi
18.	Ratmoho, S.H., M.H.	196205081989031001	
19.	Riri Indriati Purba, S.Kom	199006172015032002	
20.	Aryono Digdo Prabowo, S.T.	199103092015031003	
21.	Dr. Suprapti, S.H., M.H.	196904261992122001	Pengadilan Tinggi Palembang
22.	Sohe, S.H., M.H.	196601281992121001	
23.	Tinda Wiranasari, S.E., S.H.	198701312009122001	
24.	Ashari, S.Kom.	198811292020121002	
25.	Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.	196606181992121001	Pengadilan Tinggi Bengkulu
26.	Duta Baskara, S.H., M.H.	196404211991031004	
27.	Agief Muftahid, S.Kom	199702182020121006	
28.	Dwipraja Kumara Zuma, A.Md	199110302022031004	
29.	Saryana, S.H., M.H.	196103021986121001	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
30.	Antonius Simbolon, S.H., M.H.	196202081988031002	
31.	Eko Dwi Wibowo, S.Kom., M.T.I.	199102092015031005	
32.	Isnani Kurnia Putri, S.Kom	199108202015032004	
33.	Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.	196708151992122001	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
34.	Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.	196305251992122001	

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
35.	Irhansyah, S.Kom	198004172009121003	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
36.	Ladys Elisa Pakpahan, A.Md.T	199801152020122003	
37.	Karel Tuppu, S.H., M.H.	195904071985031005	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
38.	Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.	196101151985121001	
39.	Destian Bimantoro, S.Kom	198512132011011007	
40.	Anjani, S.Si	199202242019032015	
41.	Sudarwin, S.H., M.H.	196111031988031002	Pengadilan Tinggi Bandung
42.	Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.	196207221986011002	
43.	Devira Wiena Pramintya, S.Kom	199512152020122014	
44.	Indra Rizky Firmansyah, A.Md.T.	199108202020121003	
45.	Agus Hariyadi, S.H., M.H.	195808161985031001	Pengadilan Tinggi Semarang
46.	Bambang Utomo, S.H., M.H.	195807101984031001	
47.	Yohanes Primada Dwi Arta, S.Kom.	199708262020121006	
48.	Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.	199203242020121003	
49.	Harini, S.H., M.H.	195904041985031002	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
50.	Merina Kusumawati, S.H., M.H.	196012261986122001	
51.	Mochamad Badi` Romadloni, A.Md	199502132019031007	
52.	Erwin Fajar Saputra	-	



<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
53.	Permadi Widhiyatno, S.H., M.H	195811121984031003	Pengadilan Tinggi Surabaya
54.	H. Budi Susilo, S.H., M.H.	196105201985121001	
55.	Nur Rahman Yusro, A.Md.	199304192019031009	
56.	M. Arifin, A.Md.	199403102019031002	
57.	Ramli Darasah, S.H., M. Hum.	195708161985031004	Pengadilan Tinggi Banten
58.	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	196305311988031003	
59.	Boby Ertanto, S.H.	198704252006041002	
60.	Pribadi Hutomo Putro, S.Kom	-	
61.	Dr. Suhartanto, S.H., M.H.	196102281985121001	Pengadilan Tinggi Denpasar
62.	Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.	196312051988031004	
63.	I Gede Kartika Aryasa, S.T	197604212009041002	
64.	I Ketut Suharsana, S.Kom	198201162009121001	
65.	Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.	196107051987021001	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
66.	Gede Ariawan, S.H. M.H.	196107201988031006	
67.	Ichwan Setiawan, S.T.	198705262011011006	
68.	Satria Buana, A.Md	198403272011011011	
69.	I Made Pasek, S.H., M.H	196212311986031054	Pengadilan Tinggi Kupang
70.	Made Sukereni, S.H., M.H	196403031985032004	

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
71.	Feby Mariane Malelak, S.Kom	198402202009042006	
72.	Rian Fedrianto, S.Kom.	199001092020121003	Pengadilan Tinggi Kupang
73.	Marudut Bakara, S.H.	196108061988031002	Pengadilan Tinggi Pontianak
74.	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H	196609091987021001	
75.	ST Nina Maulia, S.T.	198611192009122005	
76.	Wisnu Sadewo, S.I.P.	199209292019031008	
77.	Didik Wuryanto, S.H., M.Hum	196109181988031007	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
78.	Heru Budyanto, S.H., M.H.	196308141992121003	
79.	Yogi Nugraha Putra, S.Kom.	199409182019031009	
80.	Bangga Chrysto Tarigan, A.Md.	199604272019031001	
81.	Eni Sri Rahayu, S.H., M.H	196205241982032002	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
82.	Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.	196711291992121001	
83.	Muhammad Andriansyah, S.T., S.H.	198212242009121004	
84.	Fahriyal, S,Kom	198509122009122005	
85.	Sukri Sulumin, S.H., M.H	196308171992121001	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
86.	Marolop Simamora, S.H., M.H.	196206121992121001	
87.	Nadya Syfa Paulina Lontoh, A.Md.A.B.	199707152022032023	
88.	Soni Prasetyo, S.Kom	-	

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
89.	Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.	196012271986031007	Pengadilan Tinggi Manado
90.	Andy Subiyantadi, S.H., M.H.	196210281986121001	
91.	Retzi Yosia Lewu, S.T	198203092009122002	
92.	Pelita Santi, A.Md.T	199802192020122003	
93.	Toto Ridarto, S.H, M.H	196705161992121001	Pengadilan Tinggi Palu
94.	Muhamad Yusuf, S.H., M.H.	196207051992121001	
95.	Rahmat Safrin Domut, S.SI	198410302009121004	
96.	Andy Yuliansyah, A.Md	199007292020121004	
97.	Dwi Purwadi, S.H., M.H.	196104231986031003	Pengadilan Tinggi Makassar
98.	Hongkun Otoh, S.H., M.H.	196707061992121001	
99.	Inggou David Purba, S.Kom., S.H., M.H.	198807072015031002	
100.	Yuli Harianto	-	
101.	Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.	196103121988031002	Pengadilan Tinggi Kendari
102.	Imam Supriyadi, S.H., M.H.	196401141991031001	
103.	Gilang Erlambang, A.Md	198906272019031003	
104.	Rista Nur Aini, A.Md.T	199708052020122005	
105.	Agung Purbantoro, S.H., M.H	196410151992121001	Pengadilan Tinggi Gorontalo
106.	Bambang Sucipto, S.H., M.H	196505291992121001	

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
107.	Faizal A. Djau, S.SI	198605232011011008	
108.	Nuri Roh Handayani, S.Kom.	199411262020122012	Pengadilan Tinggi Gorontalo
109.	Syamsudin, S.H	196010121992121001	Pengadilan Tinggi Ambon
110.	P. Cokro Hendro Mukti, S.H	196509201992031004	
111.	Mochamad Abdul Ghofur, A.Md., A.B	199705162020121002	
112.	Andi Agung, A.Md	199702042020121002	
113.	Sudira S.H., M.H	196408141992121001	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
114.	Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.	196111071985031009	
115.	Syahrudin, S.Kom.	198710192011011003	
116.	Muhammad Fadhli, A.Md	199410152020121006	
117.	Sigit Pangudianto, S.H., M.H.	196508051992121001	Pengadilan Tinggi Jayapura
118.	Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H	196303311987031002	
119.	Aditya Putra Setia Sinaga, A.Md.	199604192019041001	
120.	Hosea Griffin Wisanggeni, A.Md	199803212020121001	
121.	Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum	196508121992031004	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
122.	Sadri, S.H., M.H	196404131985031004	
123.	Muhammad Alim Abadi, S.H	198611192012121001	
124.	Muhammad Natsir, S.E	197503252005021002	



<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
125.	Bagus Irawan, S.H., M.H	196308261988031003	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
126.	Priyanto, S.H., M.Hum	196102041992121001	
127.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom	198603292015031001	
128.	Mario Tyson Nadapdap, S.E	199608172019031002	
129.	Jeferson Tarigan, S.H., M.H	196001181985031006	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
130.	Dr. Alfon, S.H., M.H	196303011992121001	
131.	R Dimas Arief Yulianto, S.E	199307102020121015	
132.	Tri Mardiyanto	-	
133.	Irfanudin, S.H., M.H	196308081992121001	Pengadilan Tinggi Papua Barat
134.	Leonard Simarmata, S.H	197406291994031003	
135.	Eka Rani R. Manuputty, S.T	198804032009122003	

